

Perencanaan Anggaran di dalam Suatu Lembaga Pendidikan Islam

Siti Sa'idah¹, Suraijjah²

¹UIN Antasari Banjarmasin, stsaidahdahlan@gmail.com

²UIN Antasari Banjarmasin, suraijjah@gmail.com

Abstract – Budget planning is a crucial aspect of managing educational institutions, including Islamic educational institutions. A budget serves not only as an operational tool to sustain institutional activities but also as a strategic guideline for achieving educational objectives, such as improving the quality of learning, developing facilities, and enhancing the welfare of educators. This study aims to analyze the concept of effective budget planning in Islamic educational institutions, focusing on budgeting principles, implementation strategies, and solutions to address common challenges. This research employs a library research method, drawing on books, journal articles, and relevant official documents. The findings reveal that effective budget planning involves comprehensive needs identification, prioritizing fund allocation, and periodic evaluations to ensure optimal budget utilization. Key principles such as transparency, efficiency, accountability, and stakeholder participation are identified as critical elements in budget planning for Islamic educational institutions. Nevertheless, Islamic educational institutions often face challenges such as limited funding, dependency on external sources, and a lack of professional financial management systems. This study highlights the importance of developing alternative funding sources, such as waqf funds, and integrating information technology to enhance accountability and transparency. With well-structured budget planning based on sound financial management principles, Islamic educational institutions can effectively support the achievement of their educational goals.

Keywords: Budget planning, Islamic educational institutions, Financial management, Transparency, Efficiency

Abstrak – Perencanaan anggaran merupakan aspek penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat operasional untuk mendukung keberlanjutan kegiatan lembaga, tetapi juga menjadi pedoman strategis dalam mencapai tujuan pendidikan, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan fasilitas, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perencanaan anggaran yang efektif di lembaga pendidikan Islam, dengan fokus pada prinsip-prinsip pengelolaan anggaran, strategi implementasi, dan solusi atas tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan, dengan mengacu pada buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang baik melibatkan identifikasi kebutuhan yang komprehensif, alokasi dana berdasarkan skala prioritas, serta evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi juga diidentifikasi sebagai elemen penting dalam perencanaan anggaran di lembaga pendidikan Islam. Meskipun demikian, lembaga pendidikan Islam sering kali menghadapi tantangan seperti keterbatasan dana, ketergantungan pada sumber eksternal, serta kurangnya sistem pengelolaan keuangan yang profesional. Penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan sumber pendanaan alternatif, seperti dana wakaf, serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan perencanaan anggaran yang matang dan berbasis pada prinsip pengelolaan keuangan yang baik, lembaga pendidikan Islam dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal.

Kata Kunci: Perencanaan anggaran, Lembaga pendidikan Islam, Pengelolaan keuangan, Transparansi, Efisiensi

Pendahuluan

Perencanaan anggaran merupakan komponen kunci dalam pengelolaan lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam. Sebagai rencana operasional yang dirancang secara kuantitatif, anggaran berfungsi untuk memastikan keberlanjutan operasional lembaga dan menjadi alat strategis dalam mencapai tujuan pendidikan. Menurut Syaifuddin, perencanaan anggaran yang baik harus didasarkan pada kebutuhan nyata lembaga dan mencakup aspek fisik seperti pengadaan fasilitas pendidikan, serta aspek non-fisik seperti pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Dalam konteks ini, anggaran memainkan peran vital dalam menentukan arah dan keberhasilan suatu lembaga pendidikan, baik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran maupun dalam memelihara kesejahteraan tenaga pendidik.¹

Era globalisasi dan digitalisasi semakin meningkatkan urgensi pentingnya perencanaan anggaran yang efektif. Sebagaimana dinyatakan oleh Asyari, persaingan global yang ketat menuntut lembaga pendidikan untuk terus berinovasi guna memberikan layanan yang kompetitif². Di sisi lain, Fatmawati dalam *Jurnal Pendidikan Islam* menyoroti bahwa lembaga pendidikan Islam sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya keuangan sehingga memerlukan pendekatan strategis dalam mengelola anggaran. Dalam kondisi seperti ini, perencanaan anggaran yang matang dapat membantu lembaga memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak dan memaksimalkan dampak positif dari setiap pengeluaran.

Namun, dalam praktiknya, perencanaan anggaran di lembaga pendidikan menghadapi berbagai tantangan. Penelitian Hidayat et al. menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan anggaran meliputi keterbatasan dana, perubahan kebijakan pemerintah, serta kebutuhan pendidikan yang terus berkembang.³ Selain itu, Ramadhan dan Agustin menekankan pentingnya fleksibilitas anggaran untuk menyesuaikan dengan perubahan situasi tanpa mengorbankan prioritas utama lembaga. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran tidak hanya membutuhkan keahlian teknis, tetapi juga keterampilan manajerial yang kuat untuk menghadapi berbagai kendala.⁴

¹ M Syaifuddin, *Manajemen Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 13–14.

² A Asyari, *Manajemen Keuangan Pendidikan*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 32.

³ A Hidayat, R Nasution, dan A Putra, "Perencanaan Anggaran dalam Lembaga Pendidikan Islam.," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 12, no. (2) (2020): 45-60.

⁴ D Ramadhan dan M Agustin, "Perencanaan Anggaran yang Fleksibel di Lembaga Pendidikan Islam.," *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 15, no. 4 (2022): 78-89.

Lebih lanjut, Siregar dalam bukunya *Manajemen Keuangan Pendidikan* menekankan bahwa perencanaan anggaran yang baik harus mencakup identifikasi kebutuhan yang komprehensif, alokasi dana berdasarkan skala prioritas, serta evaluasi berkala untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan rencana.⁵ Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan bagi lembaga pendidikan umum tetapi juga penting untuk diterapkan di lembaga pendidikan Islam. Dalam penelitian lain, Arifin dan Supriyanto menyoroti bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting dalam perencanaan anggaran, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan dana pendidikan.⁶

Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, tantangan perencanaan anggaran sering kali diperumit oleh ketergantungan pada sumber dana eksternal, seperti donasi dari masyarakat atau bantuan pemerintah. Hal ini menjadikan perencanaan anggaran sebagai alat yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal. Sebagaimana diungkapkan oleh Setiawan dalam *Jurnal Keuangan Pendidikan Islam*, lembaga yang mampu mengidentifikasi kebutuhan secara mendetail dan menentukan prioritas anggaran dengan tepat cenderung lebih efektif dalam mencapai tujuannya.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perencanaan anggaran dalam lembaga pendidikan Islam. Artikel ini akan membahas konsep dasar anggaran, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, penelitian ini juga akan menggambarkan bagaimana lembaga pendidikan Islam dapat memaksimalkan penggunaan anggaran mereka. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pengelola lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan, yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal, dokumen resmi, dan laporan penelitian yang relevan. Metode ini dianggap

⁵ A Siregar, *Manajemen Keuangan Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2015), 4–6.

⁶ Z Arifin dan R Supriyanto, "Tantangan Manajemen Keuangan di Lembaga Pendidikan Islam: Keterbatasan Dana dan Prioritas Anggaran.," *Jurnal Keuangan dan Pendidikan*, 17, no. (3) (2021): 104-118.

⁷ H Setiawan, "Optimalisasi Perencanaan Anggaran di Lembaga Pendidikan Islam.," *Jurnal Keuangan Pendidikan Islam*, 10, no. (3), (2020): 134-49.

relevan karena fokus penelitian adalah kajian teoritis dan analisis konsep perencanaan anggaran di lembaga pendidikan Islam berdasarkan literatur yang ada. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan teori-teori yang berkaitan dengan perencanaan anggaran serta menganalisis bagaimana konsep tersebut dapat diimplementasikan di lembaga pendidikan Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan situasi secara komprehensif dan menawarkan solusi berdasarkan temuan yang telah disintesis dari berbagai sumber.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi buku-buku seperti karya Syaifuddin (2004) dalam *Manajemen Pendidikan Islam* dan Siregar (2015) dalam *Manajemen Keuangan Pendidikan*. Selain itu, data juga diambil dari artikel jurnal terkini, seperti penelitian Hidayat et al. (2020) yang membahas pengelolaan anggaran dalam lembaga pendidikan Islam, serta Fatmawati (2023) yang menyoroti strategi manajemen keuangan di lembaga pendidikan Islam dengan fokus pada prioritas anggaran. Dokumen kebijakan pemerintah terkait pengelolaan anggaran pendidikan juga menjadi bagian penting dalam sumber data penelitian ini.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, identifikasi sumber literatur yang relevan melalui mesin pencari akademik seperti Google Scholar dan perpustakaan digital universitas. Kedua, seleksi literatur dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan topik penelitian, relevansi data, serta tahun publikasi (dengan prioritas pada lima tahun terakhir untuk menjaga aktualitas informasi). Ketiga, data yang diperoleh kemudian dikategorisasi berdasarkan tema, seperti konsep perencanaan anggaran, prinsip-prinsip anggaran yang baik, tantangan dalam pengelolaan anggaran, dan studi kasus di lembaga pendidikan Islam.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu pendekatan sistematis untuk memahami isi dan konteks dari sumber literatur. Proses analisis ini mencakup reduksi data, di mana informasi yang relevan dipilih dari setiap sumber; kategorisasi data berdasarkan tema penelitian; serta sintesis temuan dari berbagai sumber untuk menghasilkan kesimpulan yang mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai pandangan teoretis guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai perencanaan anggaran dalam lembaga pendidikan Islam.

Metode *library research* memiliki beberapa kelebihan. Menurut George dalam *Methods for Library Research*, metode ini memungkinkan peneliti untuk menjangkau berbagai perspektif

teoritis tanpa harus terlibat dalam pengumpulan data primer yang memakan waktu.⁸ Hal serupa juga diungkapkan oleh Creswell, yang menyatakan bahwa penelitian kepustakaan efektif untuk menyusun konsep atau model teoritis yang dapat menjadi referensi bagi implementasi praktis.⁹ Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yaitu ketergantungan terhadap literatur yang tersedia. Informasi yang diakses mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual terkini di lapangan, terutama jika terdapat perubahan kebijakan pemerintah atau dinamika organisasi yang tidak terdokumentasikan dalam literatur. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai perencanaan anggaran di lembaga pendidikan Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik di bidang manajemen keuangan pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan Islam, agar pengelolaan keuangannya dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Perencanaan Anggaran di Dalam Suatu Lembaga Pendidikan Islam

Perencanaan anggaran, merupakan faktor penting dalam pengelolaan anggaran. Perencanaan anggaran disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana dokumen perencanaan ini memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang disebut dengan rencana kerja. Sehingga perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang disajikan akan berdampak pada program kerja yang tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan tidak selarasnya antara perencanaan anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran.

Menurut Nurkholis dan Moh. Khusaini pengertian dari perencanaan anggaran adalah sebagai berikut: “Perencanaan anggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dan ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai”.¹⁰

⁸ M George, *Methods for Library Research*. (Boston: Academic Press., 2008), 95–99.

⁹ J. W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. (Los Angeles: SAGE Publications., 2018), 245.

¹⁰ Cris Kuntadi dan Dian Rosdiana, “Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature Review),” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 4, no. 2 (23 November 2022): 145, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2.1201>.

Menurut I Putu Jati Arsana menjelaskan pengertian perencanaan anggaran sebagai berikut: “Perencanaan anggaran merupakan susunan langkah-langkah sistematis melalui upaya pemanfaatan sumber daya keuangan yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”¹¹ Kemampuan mendefinisikan tujuan dan membuat strategi atau langkah yang akan dilakukan organisasi akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.¹² Nanang Fattah mengemukakan tentang pengertian perencanaan anggaran dalam suatu lembaga Pendidikan Islam dalam buku manajemen pendidikan, terdapat tahap perencanaan dasar yang berkaitan dengan konsep anggaran. Anggaran merupakan rencana operasional yang merinci pengeluaran untuk periode tertentu dalam suatu kegiatan atau proyek.¹³ Pendanaan dan pemasukan adalah elemen kunci yang secara langsung mendukung efisiensi dan efektivitas dalam manajemen pendidikan, terutama dalam lingkup manajemen sekolah. Oleh karena itu, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemeliharaan data manajemen yang transparan sangat penting untuk melibatkan masyarakat dan pemerintah. Dalam Lembaga pendidikan, pembiayaan dan aspek keuangan memiliki peran yang krusial dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perencanaan pendidikan.¹⁴ Komponen keuangan lembaga pendidikan menentukan bagaimana kegiatan dapat dijalankan dalam proses pelaksanaan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran lembaga pendidikan harus dilakukan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.¹⁵

Sumber daya keuangan dan keuangan dalam lembaga pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu dukungan dari pemerintah, kontribusi dari orang tua atau siswa, dan dukungan dari perusahaan atau mitra eksternal. Anggaran lembaga pendidikan mencakup berbagai jenis biaya, termasuk biaya rutin seperti gaji guru,

¹¹ I Putu Jati Arsana, *Etika Profesi Insinyur (Membangun Sikap Profesionalisme Sarjana Teknik*. (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 143.

¹² M Asep Fathur Rozi dan Moch. Rizal Fuadiy, “Pendekatan Strategis dalam Pengorganisasian Peserta Didik Inklusif di Sekolah Dasar,” *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 1 (1 Februari 2025): 64–79, <https://doi.org/10.18592/moe.v11i1.15579>.

¹³ H. U. R. Wahyudin, dan M. P. MM, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi Dan Akuntabilitas)*. (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 8.

¹⁴ M. Asep Fathur Rozi dan Bustanul Arifin, “Implementation of Marketing Strategies in Educational Institutions,” *EDUKASI : Jurnal Pendidikan Islam (eJournal)* 8, no. 1 SE-Articles (2020).

¹⁵ Triska Riyanti dan Mulyawan Safwandy Nugraha, “STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN: MENUJU PENDIDIKAN BERKUALITAS” 36 (2023).

biaya operasional, pemeliharaan gedung, bahan ajar, biaya konstruksi bangunan, dan lainnya.

Sumber pendanaan sendiri adalah salah satu tantangan besar dalam perencanaan anggaran lembaga pendidikan Islam. Sebagian besar lembaga pendidikan Islam bergantung pada dana eksternal, seperti sumbangan masyarakat, bantuan pemerintah, dan dana hibah. Dalam buku *Manajemen Keuangan Pendidikan Islam* oleh Hidayat, dijelaskan bahwa keterbatasan dana yang diterima dari sumber eksternal ini seringkali menjadi hambatan dalam penyusunan anggaran yang realistis. Hidayat mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan Islam perlu mencari alternatif sumber pendanaan yang lebih stabil dan berkelanjutan, seperti pendanaan melalui endowment fund atau kerjasama dengan sektor swasta, untuk mengurangi ketergantungan pada dana eksternal yang tidak dapat diprediksi.¹⁶

Selain itu, dalam konteks lembaga pendidikan Islam, pengelolaan dana dari sumber-sumber seperti zakat, wakaf, dan infaq juga perlu dimaksimalkan. Sebagai contoh, pengelolaan dana wakaf yang efektif bisa menjadi salah satu solusi untuk menyediakan dana yang cukup bagi pengembangan lembaga pendidikan Islam, seperti yang dikemukakan oleh Zainuddin dalam artikelnya di *Jurnal Ekonomi Islam*. Dengan mengelola dana wakaf secara transparan dan profesional, lembaga pendidikan Islam bisa memperoleh dana yang lebih stabil untuk mendukung berbagai program pendidikan.¹⁷

Laporan keuangan harus disiapkan dan diimplementasikan secara cermat dan menyeluruh, dimulai dari persiapan laporan keuangan, penggunaan dana, hingga pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar anggaran dapat digunakan dengan efisiensi, efektivitas, dan bebas dari praktik korupsi. Menurut Jones, fungsi manajemen anggaran Badan dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu perencanaan keuangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Komponen utama dalam manajemen anggaran melibatkan prosedur anggaran, prosedur akuntansi keuangan, pembelanjaan, prosedur investasi, dan prosedur pemeriksaan. Pengambilan keputusan dalam penganggaran melibatkan kompromi melalui pertemuan yang mempertimbangkan faktor-faktor objektif dan subjektif. Dalam proses perencanaan anggaran, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, seperti penganggaran artikel per artikel yang memungkinkan kontrol yang lebih

¹⁶ Hidayat, Nasution, dan Putra, "Perencanaan Anggaran dalam Lembaga Pendidikan Islam.," 65-66.

¹⁷ M Zainuddin, "Pemanfaatan Wakaf untuk Pendanaan Pendidikan Islam.," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1, (2022): 23-34.

ketat terhadap pengeluaran, dan penganggaran berbasis program yang menekankan tujuan spesifik dan alokasi berdasarkan analisis sistematis.¹⁸

Merencanakan tujuan adalah langkah penting untuk mengatasi kesenjangan antara situasi saat ini dan masa depan yang diinginkan. Dalam konteks perencanaan pendidikan yang kompleks, anggaran berfungsi sebagai alat untuk merumuskan rencana keuangan dan digunakan untuk mengelola sumber daya dengan efisiensi. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi berbagai kegiatan yang dilakukan dalam Pendidikan.¹⁹

2. Perencanaan Anggaran Lembaga Pendidikan Islam

Dalam perencanaan anggaran pembelajaran sekolah memerlukan beberapa Analisa yang wajib dipahami oleh seluruh pemangku kebijakan di lembaga pendidikan, baik dari kalangan penentu kebijakan, sampai kepada pelakasa dan objek dari kebijakan itu, hal ini akan berpengaruh kepada keberlangsungan manajerial yang akan dialami dalam proses pembelajaran.

Perencanaan anggaran dalam konteks lembaga pendidikan melibatkan beberapa tahapan penting. Menurut Lipham dalam buku manajemen pendidikan, ada empat fase utama yang terkait dengan proses anggaran: perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pengelolaan implementasi anggaran, dan evaluasi implementasi anggaran. Dalam penyusunan anggaran di lingkungan sekolah, terdapat tiga pendekatan anggaran yang umumnya digunakan.

Pertama, pendekatan *Comparative*, yang melibatkan perbandingan laporan atau catatan hasil dengan pengeluaran antara anggaran satu tahun lalu dan anggaran tahun berikutnya, dengan tujuan membuat keputusan anggaran berdasarkan peningkatan dari satu aspek ke aspek lainnya. Kedua, pendekatan *The Planning Programming Budgeting Evaluating System* (PPBES), yang mencakup langkah-langkah seperti menjelaskan tujuan program dalam struktur tertentu, mengevaluasi nilai dari setiap alternatif, dan merinci biaya implementasi serta evaluasi setiap program. Ketiga, pendekatan *Function*, yang dimulai dengan menetapkan tujuan sekolah sebagai langkah awal dalam proses

¹⁸ Supriyadi E dan S Kom, *Sistem informasi bisnis dunia versi 4.0*. (Jakarta: Andi, 2020), 12.

¹⁹ Helfinasyam Batubara, "ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA PENDIDIKAN," *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2 November 2022): 262, <https://doi.org/10.47006/pendalas.v2i3.169>.

penganggaran. Pendekatan ini menggabungkan elemen-elemen dari pendekatan komparatif dan PPBES.²⁰

Anggaran pada dasarnya merupakan sebuah rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk unit moneter, dan berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan selama periode tertentu. Oleh karena itu, anggaran mencerminkan rencana konkret yang akan dijalankan oleh lembaga pendidikan. Hal ini juga merupakan tahap positif menuju implementasi rencana yang telah disiapkan, dan melibatkan kepemimpinan dari setiap unit organisasi. Anggaran pada dasarnya adalah hasil dari negosiasi atau perjanjian antara pimpinan tingkat atas dan tingkat bawah untuk menentukan besaran anggaran yang akan dialokasikan. Dalam proses negosiasi ini, ditetapkan pula pengeluaran yang diharapkan serta pendapatan yang akan diperoleh dari berbagai sumber.²¹

Adapun Menurut Syaifuddin dalam *Manajemen Pendidikan Islam*, langkah pertama dalam perencanaan anggaran adalah identifikasi kebutuhan lembaga, baik dalam aspek fisik (seperti sarana dan prasarana) maupun aspek non-fisik (seperti kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia).²² Proses identifikasi ini sangat penting karena akan menentukan alokasi anggaran untuk setiap kebutuhan yang ada. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Asyari dalam *Manajemen Keuangan Pendidikan*, yang menjelaskan bahwa perencanaan anggaran yang baik harus berfokus pada prioritas yang paling mendesak dan penting untuk dicapai dalam suatu periode anggaran.²³

Lembaga pendidikan Islam, menurut Asyari, harus memiliki kemampuan untuk menganalisis kebutuhan dalam jangka pendek dan panjang. Misalnya, jika kebutuhan utama saat ini adalah meningkatkan kualitas pengajaran dan pelatihan bagi guru, maka anggaran harus dialokasikan untuk kegiatan pengembangan profesi. Sebaliknya, jika infrastruktur menjadi prioritas, dana harus diprioritaskan untuk renovasi dan pemeliharaan sarana pendidikan. Hal ini menekankan pentingnya ketepatan dalam penentuan prioritas agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tidak terbuang sia-sia.

3. Karakteristik dan Fungsi Perencanaan Anggaran Pendidikan

²⁰ Fattah Nanang, *Manajemen pendidikan islam*. (Yogyakarta: Gajahmada University Press., 2000), 45.

²¹ Nanang, 46-47.

²² Syaifuddin, *Manajemen Pendidikan Islam*., 22.

²³ Asyari, *Manajemen Keuangan Pendidikan*., 70.

Anggaran pada umumnya terdiri dari dua, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga pendidikan dari berbagai sumber. Sedangkan pengeluaran ditentukan dari alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai. Penganggaran adalah salah satu tahapan dari proses perencanaan tata kelola keuangan pendidikan. Dari pembahasan pengeluaran, istilah-istilah yang digunakan adalah:

- a. *Capital expenditure*: Adalah pengeluaran untuk barang-barang yang tahan lama, seperti laboratorium, gudang sekolah, sarana olahraga, tempat parkir dll.
- b. *Recurrent expenditure*: Adalah pengeluaran rutin atau bersifat tiap-tiap tahun, seperti gaji, barang yang harus di ganti. Karakteristik penganggaran adalah suatu anggaran yang bisa dinyatakan dalam satuan keuangan dan non keuangan, berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk sasaran yang ditetapkan.

Karakteristik penganggaran ada lima yaitu:

- a. Partisipasi anggaran (*budgetary participation*), adalah salah satu pendekatan yang dapat membangun hubungan kerja sama atasan dan bawahan.
- b. Umpan balik anggaran (*budgetary feedback*), adalah syatu umpan balik terhadap sasaran yang dicapai adalah variabel penting yang memberikann motivasi kepada manajer.
- c. Kejelasan sasaran anggaran (*budget goal clarity*), mencerminkan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik, sehingga dapat dipahami oleh orang yang bertanggung jawab dalam pencapain sasaran tersebut.
- d. Kesulitan kejelasan sasaran (*budget goal difficult*), kesulitan sasaran anggaran mempunyai rentang sasaran dari sangat longgar dan mudah dicapai sampai sangat ketat dan sulit untuk digapai. Sasaran anggaran yang lebih ketat menimbulkan motivasi yang lebih tinggi, namun jika melewati atas limitnya, maka pengetatan sasaran anggaran justru akan mengurangi motivasi.
- e. Evaluasi anggaran (*budgetary evaluation*), evaluasi anggaran ialah suatu tindakan yang dilakuka untuk menelusuri penyimpangan atas anggaran departemen yang bersangkutan. Hal ini akan mempengaruhi sikap, karakter, tingkah laku dan kinerja manajer. Anggaran pendidikan mempunyai beberapa tugas yaitu sebagai perencanaan, pengendalian dan juga sebagai alat manajemen untuk mengarahkan suatu lembaga

pendidikan pada posisi kuat atau lemah.²⁴

Anggaran sekolah tidak hanya berperan sebagai alat perencanaan dan kontrol, tetapi juga memiliki peran penting sebagai alat manajemen yang memungkinkan lembaga untuk menilai posisi kekuatan dan kelemahan mereka.²⁵ Sebagai alat manajemen, anggaran menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Selain itu, anggaran memiliki kemampuan untuk memengaruhi dan memotivasi pemimpin, manajer, dan karyawan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.²⁶ Di samping itu anggaran pendidikan sendiri berfungsi sebagai:

- a. Perencanaan, Fungsi ini dapat membantu satuan kerja untuk mengetahui arah kebijakan ke depan sesuai anggaran.
- b. Pengendalian, fungsi dapat menghindari pengeluaran yang berlebihan (pemborosan) serta dapat menghindari penggunaan anggaran yang tidak proporsional, yakni tidak tepat guna, tidak efisien dan tidak efektif sebagaimana mestinya dapat merugikan proses layanan pendidikan.
- c. Alat koordinasi dan komunikasi, Dokumen anggaran yang komprehensif dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkoordinasikan tugas satuan kerja atau bagian lainnya. Alat penilaian kinerja, bisa dijadikan barometer setiap unit apakah sudah bekerja sesuai target dan sasaran kerja atau tidak. Hal ini disebabkan dalam penyusunan rencana kerja telah disesuaikan dengan anggaran yang dibutuhkan, sehingga efektif atau tidaknya pelaksanaan program terlihat dari penyerapan atau belanja anggaran.
- d. Alat efisien atau motivasi, Anggaran pendidikan dapat secara efektif menjawab permasalahan yang realistis (rasional). Anggaran tidak boleh terlalu besar sehingga sulit dibiayai atau digunakan, tetapi juga tidak boleh terlalu kecil sehingga sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, ketepatan anggaran dapat menjadi motivasi pegawai dalam bekerja karena didukung oleh anggaran yang memadai (relatif).²⁷

Dengan bantuan berbagai fungsi anggaran pelatihan yang disebutkan di atas, manajer pelatihan idealnya dapat memilih anggaran yang dibutuhkan, sehingga mudah

²⁴ Nanang, *Manajemen pendidikan islam.*, 49.

²⁵ Riyanti dan Nugraha, "STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN: MENUJU PENDIDIKAN BERKUALITAS," 474.

²⁶ Agustina Henukh, "Perencanaan Penganggaran Pendidikan Berbasis Manajemen Biaya Terpadu Di SD Negeri Lotelutun Kecamatan Rote Barat Daya Provinsi NTT," t.t.

²⁷ Muhammad Jihadi, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Solo: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 55-57.

untuk membelanjakan dan mempertanggungjawabkan. Untuk itu diperlukan kehati-hatian dan teliti dalam menyusun anggaran pendidikan yang akan dilaksanakan.

4. Prinsip-Prinsip dan Prosedur Penyusunan Anggaran Pendidikan

Prinsip-prinsip dan prosedur penyusunan anggaran di lembaga pendidikan memiliki fungsi sebagai alat dalam perencanaan maupun pengendalian Adapun anggaran yang baik mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi
- b. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran
- c. Adanya penelitian untuk menilai kinerja organisasi
- d. Adanya dukungan dari pelaksana mulai tingkat atas sampai tingkat bawah.²⁸

Persoalan penting dalam menyusun anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas. Itulah sebabnya dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan yang sistematis. Penyusunan anggaran skala kecil, biasanya disiapkan oleh staf administrasi departemen atau pengawas. Sedangkan penganggaran sebagian besar ditransfer ke departemen anggaran, departemen atau komite yang secara khusus merencanakan anggaran. Secara khusus, misalnya, anggaran rutin pendidikan yang dilaksanakan di sekolah dasar disusun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh sekolah, yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis, kemudian disajikan sebagai pendapatan bantuan anggaran dari pemerintah negara bagian atau daerah. Adapun prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran
- b. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang
- c. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial
- d. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang
- e. Melakukan revisi usulan anggaran

²⁸ Toha Ma'sum, Dwi Jayanti, dan Dewi Mukhalafatun, "Strategi Penyusunan Anggaran Pendidikan," *CERMIN Jurnal* 3, no. 1 (2023): 63.

- f. Persetujuan revisi usulan anggaran
- g. Pengesahan anggaran.²⁹

Menurut Nanang Fattah Prosedur penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode penganggaran.
 - 1) Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang.
 - 2) Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang karena anggaran pada dasarnya merupakan finansial.
 - 3) Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.
 - 4) Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
 - 5) Melakukan revisi usulan anggaran.
 - 6) Persetujuan revisi usulan anggaran.
 - 7) Pengesahan anggaran.³⁰
- b. Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS)

Proses pengembangan RAPBS pada umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Pada tingkat kelompok kerja; Kelompok kerja yang dibentuk Sekolah yang terdiri dari para pembantu kepala sekolah memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia.
- 2) Pada tingkat kerjasama dengan komite Sekolah; Kerjasama antara komite madrasah dengan kelompok kerja yang telah terbentuk perlu dilakukan untuk mengadakan rapat pengurus dan rapat anggota dalam mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBS.

²⁹ Ulfa Dj. Nurkamiden dan Herson Anwar, "KONSEP MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM," *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 1 (28 Maret 2023): 53–54, <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v11i1.3384>.

³⁰ Nurkamiden dan Anwar, 61.

- 3) Sosialisasi dan legalitas; Setelah RAPBS dibicarakan dengan komite sekolah selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap sosialisasi selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBS kepada Kanwil Departemen Agama untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.³¹

Adapun menurut Supriyadi dalam bukunya *Prinsip Dasar Manajemen Pendidikan* menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan anggaran yang harus diterapkan oleh lembaga pendidikan Islam antara lain adalah transparansi, efisiensi, efektivitas,³² akuntabilitas, dan partisipasi. Prinsip transparansi menuntut agar seluruh proses perencanaan anggaran dilakukan dengan terbuka, sehingga semua pihak dapat mengetahui dan memahami alokasi dana yang dilakukan. Efisiensi dan efektivitas menuntut agar dana yang tersedia digunakan seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sementara itu, prinsip akuntabilitas mengharuskan lembaga untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Selain itu, prinsip partisipasi mengajak semua pihak, termasuk pengelola lembaga, guru, siswa, dan masyarakat, untuk terlibat dalam proses perencanaan anggaran. Partisipasi ini penting untuk menciptakan keputusan yang lebih demokratis dan lebih sesuai dengan kebutuhan semua pihak. Dengan melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan Islam dapat memperoleh dukungan yang lebih besar dalam pelaksanaan anggaran dan program pendidikan.³³

5. Bentuk-Bentuk Desain Anggaran

Bentuk desain anggaran yang dianut sekolah pada umumnya terdapat empat bentuk. Menurut Thomas empat jenis budget yang dimaksud adalah : *Budgeting by line item*, *Budgeting by organizational unit*, *Budgeting by functional category*, *Budgeting by program or performance*. Adapun menurut Nanang Fattah bentuk- bentuk desain yang dimaksud adalah sebagai berikut: Anggaran per butir (*line item budget*). Anggaran program (*program budget sistem*) Anggaran berdasarkan hasil (*performance budget*), Sistem penyusun program dan

³¹ Risma Darma Ulina Banurea, Riski Erisah Simanjuntak, dan Romauli Siagian, "PERENCANAAN PENDIDIKAN" 2 (2023): 92-93.

³² I Supriyadi, *Prinsip Dasar Manajemen Pendidikan*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 47-48.

³³ M. Asep Fathur Rozi, "Strategi Hubungan Masyarakat dalam Pendidikan Islam," *EDUKASI : Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)* 5, no. 1 (2017).

penggaran (*planing programming budgeting sistem/PPBS* atau SP4).³⁴

Anggaran butir perbutir (*lineitem budget*) adalah bentuk anggaran yang palingsederhana dan sering digunakan. setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori, misalnya gaji, upah, dan honor menjadi satu kategori atau satu butir. Anggaran program (*program budget sistem* adalah sebuah bentuk anggaran yang sudah dirancang untuk mengidentifikasikann biaya setiap programnya. Dalam anggaran, harga produk dihitung berdasarkan jenis jumlah yang dibeli, sedangkan dalam anggaran program dihitung berdasarkan jenis program. Misalnya, jika anggaran khusus menyebutnya gaji guru (nomor 1), maka laporan anggaran menyebutkan bahwa gaji rencana pengajaran sains hanya satu komponen, dan komponen lain dari program eksperimen meliputi peralatan ilmiah, bahan eksperimen kimia, dll. satu paket.

Anggaran berdasarkan hasil (*perfomance budget*) ialah bentuk anggaran yang menekankan hasil dan bukan padaa keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Hasil pengukuranya dipergunakan untuk menghitung masukan dana dan tenaga yang dipergunakan untuk mencapai suatu program. Sitem perencanaan penyusunan program dan penganggaran (*planing programming budgening sistem/PPBS* atau SP4) adalah sebuah kerangka kerja dalam perencanaan dalam mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. Dalam bentuk ini, setiap program dinyatakan jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

6. Strategi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M)

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi keuangan meliputi strategi perencanaan (pengaktifan ide), implementasi, evaluasi dan pemantauan.

Strategi perencanaan pembiayaan pendidikan sekolah, menengah diawali dengan perumusan visi dan misi sekolah, strategi perencanaan dan penyusunan RAPBS dilakukan dengan analisis SWOT sederhana. Strategi perencanaan keuangan sekolah merupakan bagian penting dalam pengelolaan yang harus ditentukan sesuai dengan faktor internal dan eksternal perusahaan/lembaga, termasuk sekolah. Selain itu, strategi implementasi juga dipengaruhi oleh hasil pendefinisian strategi desain.

³⁴ Makmur Syukri, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 34–36.

Harjanto menyebutkan bahwa perencanaan proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, dalam penyusunan perencanaan keuangan sekolah, sekolah telah sepenuhnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan keuangan sekolah, sehingga menurut Mulyasa, perencanaan keuangan sekolah setidaknya mencakup dua fungsi, yaitu penyusunan anggaran dan pengembangan biaya sekolah. rencana anggaran belanja (RAPBS).³⁵

Penganggaran merupakan visualisasi atau gambaran kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan, yang juga dapat diidentifikasi dengan menentukan satuan biaya dari setiap kegiatan. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian juga merupakan alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Selain itu pula anggaran mempunyai manfaat atau berfungsi yang dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Sebagai alat penafsir yaitu untuk memperkirakan besarnya pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat dilihat kebutuhan dana yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan pendidikan di lembaga.
- b. Sebagai alat kewenangan yaitu dapat memberikan kewenangan untuk pengeluaran dana, sehingga melalui anggaran dapat diketahui besarnya uang atau dana yang boleh dikeluarkan untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggran sebelumnya.
- c. Sebagai alat efisiensi, dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan, yang kemudian dapat dibandingkan dengan perencanaan untuk menganalisis apakah terdapat pemborosan atau bahkan penghematan anggaran..

Setiap sekolah atau madrasah wajib menyusun RAPBS sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 53 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu: Rencana Kerja Tahunan hendaknya memuat rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun, RAPBS ialah rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunaan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalaam satu tahun anggaran.³⁶

Dengan demikian RAPBS/M berisi tentang ragam sumber pendapatan dan jumlah

³⁵ Ma'sum, Jayanti, dan Mukhalafatun, "Strategi Penyusunan Anggaran Pendidikan," 66-67.

³⁶ F Amin, *Penganggaran di pemerintah daerah*. (Malang: Pers Universitas Brawijaya., 2019), 8.

nominalnya baik rutin maupun pembangunan, rga pembelanjannya dan jumlah nominalnya dalam satu tahun. RAPBS perlu memperhatikan asas anggaran berikut ini:

- a. Asas kecermatan;
- b. Asas terperinci;
- c. Asas keseluruhan;
- d. Asas keterbukaan;
- e. Asas periodic;
- f. Asas pembenaan.

Masalah-masalah terkait dengan penyusunan RAPBS: Salah satu implikasi dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan sistem pendidikan adalah diharuskannya pimpinan sekolah (terutama kepala sekolah) untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam proses pengembangan RAPBS. Oleh karena itu, pimpinan itu disarankan menyadari berbagai masalah yang harus mereka hadapi untuk melaksanakan tanggung jawab yang besar itu.³⁷

Berikut ini diuraikan beberapa masalah yang sering muncul dalam proses penyusunan RAPBS.

- a. Anggaran diusulkan didasarkan uang yang tersedia dan tidak didukung pengetahuan yang memadai.
- b. Kurang lengkapnya penjelasan tentang pentingnya usulan anggaran untuk meningkatkan belajar siswa.
- c. Penurunan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun
- d. Kurangnya kemampuan dalam mengevaluasi usulan anggaran.
- e. Permintaan untuk membeli barang bermerek tertentu atau ancaman sentralisasi anggaran.
- f. Kurangnya pembinaan, komunikasi, dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.³⁸

Strategi perencanaan pembiayaan sekolah merupakan bagian penting dari manajemen yang perlu ditentukan sesuai dengan faktor internal dan eksternal suatu perusahaan/ lembaga termasuk sekolah. Selain itu hasil dari penentuan strategi perencanaan akan berimplikasi pada strategi pelaksanaan. RAPBS merupakan suatu pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan yang menggunakan keuangan sekolah. Tahap

³⁷ Batubara, "ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA PENDIDIKAN," 266.

³⁸ Batubara, 267.

dan kerangka penyusunan rencana strategis meliputi perumusan misi lembaga, dalam hubungan ini penyusunan RAPBS memerlukan analisis masalah dan lingkungan eksternal yang mencakup kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), ancaman (threats), penentuan arah, sasaran dan strategi, identifikasi program dan proyeksi keuangan.

Strategi penyusunan anggaran pembiayaan di sekolah yaitu sebagai berikut:

- a. Suatu pola keputusan yang konsisten, masuk akal dan menyatu di setiap komponen
- b. Menerapkan dan menetapkan tujuan lembaga untuk alokasi sumber daya pendidikan yang dinyatakan dalam tujuan, inisiatif, prioritas jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- c. Memilih jenis kemampuan, keahlian, keterampilan, dan pengetahuan yang akan diperlukan oleh kelompok di masa yang akan datang.
- d. Merespons dengan cepat semua tantangan dan peluang, serta kerentanan dan keuntungan yang ada di bidang lembaga pendidikan.
- e. Meningkatkan dan membangun komitmen dari semua pihak, siswa, orang tua, masyarakat, pemerintah, unit-unit kemendikbud (kementerian pendidikan dan kebudayaan) untuk meningkatkan standar internal sekolah (kepala sekolah siswa)
- f. Menentukan tingkat kontribusi dari setiap input pendidikan yang dibebankan biaya terhadap mutu pendidikan atau prestasi belajar siswa (efisiensi internal) dan angka permintaan masyarakat terhadap lulusan (efisiensi eksternal).³⁹

Dan perlu digarisbawahi tantangan terbesar dalam pengelolaan anggaran di lembaga pendidikan Islam adalah ketidakstabilan dana yang tersedia. Hal ini diungkapkan oleh Anwar dalam bukunya *Manajemen Pendidikan Islam: Teori dan Praktik*, yang mencatat bahwa banyak lembaga pendidikan Islam yang kesulitan dalam menyusun anggaran jangka panjang karena dana yang tidak dapat dipastikan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perencanaan anggaran harus dilakukan dengan fleksibilitas yang cukup, sehingga lembaga dapat mengalokasikan dana dengan bijak dalam menghadapi ketidakpastian tersebut.⁴⁰

Selain itu, kurangnya sistem pengelolaan keuangan yang profesional juga menjadi hambatan dalam pengelolaan anggaran. Dalam hal ini, Hidayat menyoroti pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam mempermudah pencatatan dan pelaporan

³⁹ Riyanti dan Nugraha, "STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN: MENUJU PENDIDIKAN BERKUALITAS," 476-77.

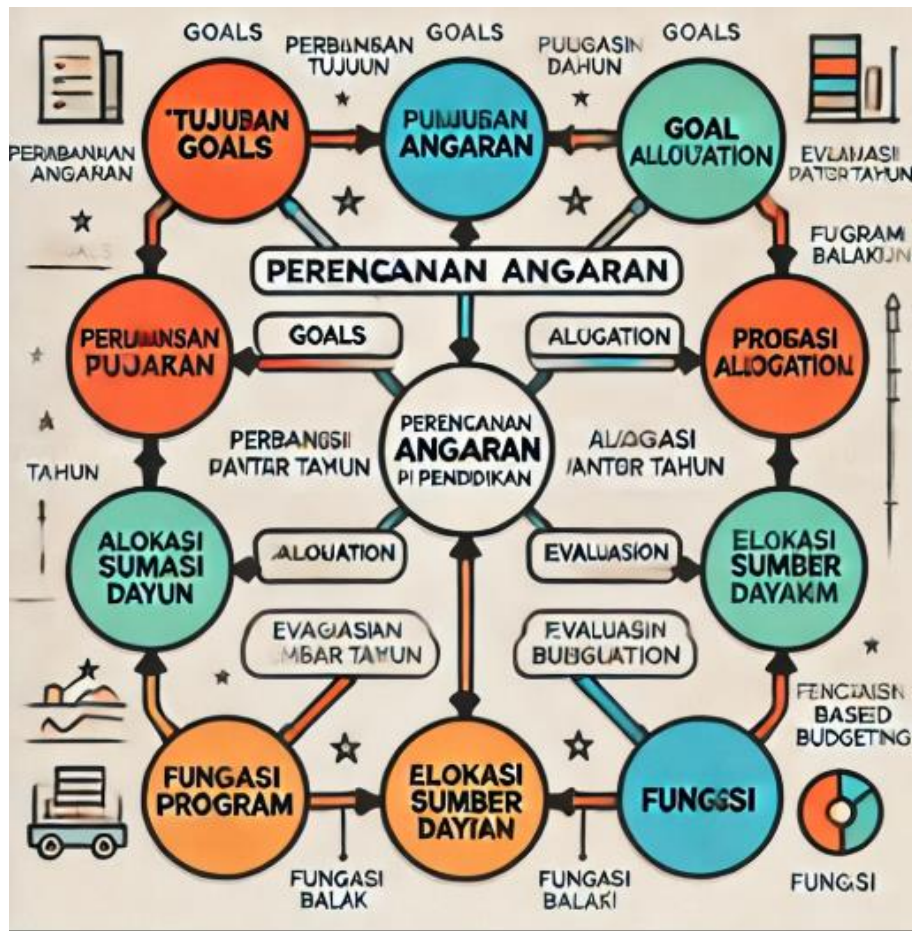
⁴⁰ A Anwar, S, *Manajemen Pendidikan Islam: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Prenadamedia Group., 2015), 23-25.

keuangan. Lembaga pendidikan Islam yang menggunakan sistem informasi keuangan yang baik akan lebih mudah memantau pengeluaran dan memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan rencana anggaran. Hal ini penting untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran lembaga Pendidikan Islam.

Evaluasi dan pengendalian anggaran menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam perencanaan anggaran. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, evaluasi anggaran dilakukan untuk menilai sejauh mana anggaran yang telah direncanakan dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Supriyadi menambahkan bahwa evaluasi anggaran dilakukan dengan memeriksa apakah alokasi dana telah efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengendalian anggaran juga dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan dana atau pemborosan yang tidak perlu.

Dalam buku *Manajemen Keuangan Pendidikan* oleh Asyari, dijelaskan bahwa evaluasi dilakukan melalui pemantauan yang terus menerus terhadap penggunaan dana dan laporan keuangan, sementara pengendalian dilakukan dengan menetapkan batas-batas tertentu yang harus dipatuhi oleh pengelola anggaran. Hal ini untuk memastikan bahwa penggunaan dana selalu dalam jalur yang sesuai dengan rencana dan tujuan lembaga.

Gambar 1: Kerangka Pikir Perencanaan Anggaran pada suatu Lembaga Pendidikan Islam



Tabel 1 : Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Utama	Sumber	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
Hidayat et al. (2020)	Perencanaan Anggaran dalam Lembaga Pendidikan Islam	Studi Kasus	Lembaga pendidikan Islam yang sukses menerapkan perencanaan anggaran menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan evaluasi berkala.	Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 12(2).	Menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi dalam perencanaan anggaran.	Fokus pada kasus spesifik di lembaga tertentu, tidak mengembangkan solusi berbasis konsep umum.
Fatmawati (2023)	Strategi Manajemen Keuangan di Lembaga Pendidikan Islam	Studi Kepustakaan	Pengelolaan anggaran yang melibatkan stakeholder dan pemanfaatan teknologi dapat	Jurnal Pendidikan Islam, 8(1).	Keterlibatan stakeholder dan teknologi sebagai elemen penting	Menekankan strategi berbasis teknologi tanpa membahas solusi pendanaan alternatif seperti wakaf.

			meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan lembaga.		dalam pengelolaan anggaran.	
Arifin & Supriyanto (2021)	Tantangan Manajemen Keuangan di Lembaga Pendidikan Islam	Kualitatif Deskriptif	Keterbatasan dana dan ketergantungan pada sumber eksternal adalah kendala utama. Solusi melibatkan diversifikasi sumber pendanaan seperti wakaf.	Jurnal Keuangan dan Pendidikan, 17(3).	Menyoroti tantangan keterbatasan dana dan solusi pendanaan alternatif seperti wakaf.	Lebih fokus pada analisis kendala keuangan dibanding strategi penyusunan anggaran secara teknis.
Ramadhan & Agustin (2022)	Perencanaan Anggaran yang Fleksibel di Lembaga Pendidikan Islam	Studi Kepustakaan	Fleksibilitas anggaran memungkinkan lembaga pendidikan Islam untuk beradaptasi dengan perubahan mendadak tanpa mengorbankan prioritas utama.	Jurnal Ekonomi Pendidikan, 15(4).	Pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan anggaran untuk menghadapi dinamika perubahan eksternal.	Tidak membahas prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara mendalam seperti pada artikel Anda.
Setiawan (2020)	Optimalisasi Perencanaan Anggaran di Lembaga Pendidikan Islam	Studi Kasus	Identifikasi kebutuhan yang komprehensif dan penentuan prioritas berdasarkan dampaknya terhadap tujuan pendidikan dapat mengatasi keterbatasan anggaran	Jurnal Keuangan Pendidikan Islam, 10(3).	Menekankan pentingnya identifikasi kebutuhan dan prioritas dalam perencanaan anggaran.	Terbatas pada studi kasus tertentu, tidak memberikan panduan umum untuk berbagai lembaga pendidikan.

Kesimpulan

Perencanaan anggaran di lembaga pendidikan islam merupakan komponen kunci dalam manajemen keuangan yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses ini melibatkan langkah-langkah sistematis yang meliputi perumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan evaluasi. Pengelolaan anggaran yang baik mencakup perencanaan yang matang agar kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Terdapat beberapa pendekatan dalam perencanaan anggaran, seperti perbandingan antar tahun, evaluasi program, dan penganggaran berdasarkan fungsi. Karakteristik anggaran melibatkan partisipasi, umpan balik, kejelasan sasaran, tingkat kesulitan, dan evaluasi, yang mempengaruhi kinerja manajemen. Anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk perencanaan, pengendalian, koordinasi, dan motivasi, serta sebagai alat ukur keberhasilan lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan.

Penyusunan anggaran harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti pembagian wewenang, sistem akuntansi yang baik, serta keterlibatan semua pihak dari tingkat atas hingga bawah. Selain itu, prosedur penyusunan anggaran yang baik melibatkan identifikasi kegiatan, perhitungan sumber daya, dan pengesahan dari pihak berwenang. Anggaran sekolah berfungsi sebagai alat penafsir, kewenangan, dan efisiensi yang mempengaruhi pengelolaan keuangan dalam lembaga pendidikan.

Secara keseluruhan, perencanaan dan pengelolaan anggaran yang efektif sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan, dan harus dilakukan dengan transparansi, kecermatan, serta partisipasi dari seluruh pemangku kebijakan. Dengan perencanaan anggaran yang matang dan berbasis pada prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik, lembaga pendidikan Islam dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi pengelola lembaga pendidikan Islam untuk terus meningkatkan kapasitas mereka dalam menyusun, mengelola, dan mengevaluasi anggaran, sehingga dapat beradaptasi dengan tantangan yang ada dan menjaga keberlanjutan lembaga pendidikan.

Daftar Pustaka

- Amin, F. *Penganggaran di pemerintah daerah* . Malang: Pers Universitas Brawijaya., 2019.
- Anwar, A, S. *Manajemen Pendidikan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group., 2015.

- Arifin, Z, dan R Supriyanto. "Tantangan Manajemen Keuangan di Lembaga Pendidikan Islam: Keterbatasan Dana dan Prioritas Anggaran." *Jurnal Keuangan dan Pendidikan*, 17, no. (3) (2021): 104-118.
- Arsana, I Putu Jati. *Etika Profesi Insinyur (Membangun Sikap Profesionalisme Sarjana Teknik*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Asyari, A. *Manajemen Keuangan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Banurea, Risma Darma Ulma, Riski Erisah Simanjuntak, dan Romauli Siagian. "PERENCANAAN PENDIDIKAN" 2 (2023).
- Batubara, Helfinasyam. "ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA PENDIDIKAN." *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2 November 2022): 258-69. <https://doi.org/10.47006/pendalas.v2i3.169>.
- Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE Publications., 2018.
- E, Supriyadi, dan S Kom. *Sistem informasi bisnis dunia versi 4.0*. Jakarta: Andi, 2020.
- George, M. *Methods for Library Research*. Boston: Academic Press., 2008.
- Henukh, Agustina. "Perencanaan Penganggaran Pendidikan Berbasis Manajemen Biaya Terpadu Di SD Negeri Lotelutun Kecamatan Rote Barat Daya Provinsi NTT," t.t.
- Hidayat, A, R Nasution, dan A Putra. "Perencanaan Anggaran dalam Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 12, no. (2) (2020): 45-60.
- Jihadi, Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Solo: Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Kuntadi, Cris dan Dian Rosdiana. "Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature Review)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 4, no. 2 (23 November 2022): 142-52. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2.1201>.
- Ma'sum, Toha, Dwi Jayanti, dan Dewi Mukhalafatun. "Strategi Penyusunan Anggaran Pendidikan." *CERMIN Jurnal* 3, no. 1 (2023): 61-67.
- Nanang, Fattah. *Manajemen pendidikan islam*. Yogyakarta: Gajahmada University Press., 2000.
- Nurkamiden, Ulfa Dj., dan Herson Anwar. "KONSEP MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 1 (28 Maret 2023): 53-64. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v11i1.3384>.
- Ramadhan, D, dan M Agustin. "Perencanaan Anggaran yang Fleksibel di Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 15, no. 4 (2022): 78-89.

- Riyanti, Triska, dan Mulyawan Safwandy Nugraha. "STRATEGI PERENCANAAN ANGGARAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN: MENUJU PENDIDIKAN BERKUALITAS" 36 (2023).
- Rozi, M. Asep Fathur. "Strategi Hubungan Masyarakat dalam Pendidikan Islam." *EDUKASI : Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)* 5, no. 1 (2017).
- Rozi, M. Asep Fathur, dan Bustanul Arifin. "Implementation of Marketing Strategies in Educational Institutions." *EDUKASI : Jurnal Pendidikan Islam (e-Journal)* 8, no. 1 SE-Articles (2020).
- Rozi, M Asep Fathur, dan Moch. Rizal Fuadiy. "Pendekatan Strategis dalam Pengorganisasian Peserta Didik Inklusif di Sekolah Dasar." *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 11, no. 1 (1 Februari 2025): 64-79. <https://doi.org/10.18592/moe.v11i1.15579>.
- Setiawan, H. "Optimalisasi Perencanaan Anggaran di Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Keuangan Pendidikan Islam*, 10, no. (3), (2020): 134-49.
- Siregar, A. *Manajemen Keuangan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Supriyadi, I. *Prinsip Dasar Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Syaifuddin, M. *Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Syukri, Makmur. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Wahyudin, H. U. R., dan M. P. MM,. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi Dan Akuntabilitas)*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Zainuddin, M. "Pemanfaatan Wakaf untuk Pendanaan Pendidikan Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1, (2022): 23-34.